



LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE 2019

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2019

Daftar Istilah

A _____

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah

ASN : Aparatur Sipil Negara

B _____

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBKSDA : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

BBTN : Balai Besar Taman Nasional

BMN : barang Milik Negara

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BTN : Balai Taman Nasional

BPEE : Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

C _____

CA : Cagar Alam

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

D _____

DENTANAS : Dewan Ketahanan Nasional

DITJEN : Direktorat Jenderal

DJA : Direktorat Jenderal Anggaran

G _____

GTM : Gugus Tugas Multipihak

H _____

HAPAK : Hasil Penilaian Angka Kredit

I _____

ICT : Information and Communication Technology

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKP : Indikator Kinerja Program

K _____

KEE : Kawasan Ekosistem Esensial

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KK : Kawasan Konservasi

KKH : Konservasi Keanekaragaman Hayati

KKI : Kebijakan Kelautan Indonesia

KMPT : Kelompok Masyarakat Pemanfaat Turbin

KPHK: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KSP : Kantor Staf Presiden

L _____

LCR : Laporan Capaian Renja

LHKASN : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

LKj : Laporan Kinerja

M _____

MSP : Memorandum Saling Pengertian

O _____

OFI : Orangutan Foundation Internasional

OSS : Online Single Submission

P _____

PEH : Pengendali Ekosistem Hutan

PK : Perjanjian Kinerja

PN : Prioritas Nasional

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PMPRB : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

R _____

RBM : Resort Based Management

RKAKL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga

RENJA : Rencana Kerja

RENSTRA : Rencana Strategis

RFID : Radio Frequency Identification

RKBMN : Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

RM : Rupiah Murni

S _____

SETDITJEN : Sekretariat Direktorat Jenderal

SBSN : Surat Berharga Syariah Negara

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

SIMAKSI : Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi

SIK : Sistem Informasi Kearsipan

SM : Suaka Margasatwa

SOP : Standar Operasional Prosedur

T _____

TPKN : Tim Penyelesaian Kerugian Negara

TUN : Tata Usaha Negara

TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar

U _____

UPT : Unit Pelaksana Teknis

W _____

WBK : Wilayah Bebas Korupsi

WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

WCS : Wildlife Conservation Society

Ringkasan Capaian Kinerja

Sesuai yang diamanatkan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019, bahwa visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Selanjutnya misi pembangunan nasional adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang KSDAE adalah **"Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia"**. Dimana sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang ingin diwujudkan yaitu:

1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan program **Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem**, melalui delapan kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
6. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
7. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta
8. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diukur dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tersebut mendukung sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Target kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretariat Direktorat Jenderal

dengan Direktur Jenderal KSDAE yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,00 poin.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Evaluasi implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen KSDAE dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 78,44 dengan kategori BB (sangat Baik). Rincian penilaian hasil evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE atas lima komponen besar manajemen kerja sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai skor 25,29;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai skor 19,72;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai skor 12,33;
- d. Evaluasi Kinerja (10%), dengan nilai skor 6,55;
- e. Pencapaian Kinerja (20%), dengan nilai skor 14,56.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 sebesar Rp. 69.198.957.000 yang terbagi dalam 3 *output*. Realisasi anggaran sebesar Rp. 63.780.039.624 atau sebesar **92,17 %**. Berdasarkan 3 output kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran sebesar 93,27%, berturut-turut diikuti oleh output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 91,47% dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 71,52%. Berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran tersebut, kemudian dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Dari hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 100,56 % dan realisasi anggaran sebesar 92,17%.

Kendala yang dihadapi dalam evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu:

1. Perencanaan kinerja:
 - a) Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan.
 - b) Target jangka menengah dalam Renstra tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring secara berkala.
2. Perencanaan kinerja tahunan:
 - a) Belum dilakukan rewiu renstra.
 - b) Terdapat perbedaan target IKP pertahun pada dokumen PK eselon I dengan PK eselon II pada 5 IKP.
3. Pengukuran kinerja:
 - a) Direktorat teknis belum ada SOP
 - b) Data kinerja eselon I kurang akurat karena ada beberapa satker yang tidak tertib dalam mengumpulkan data kinerja.
 - c) Belum ada pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staff, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi.
 - d) Hasil pengukuran kinerja terkait *reward* dan *punishment* belum diterapkan.

- e) Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap IKP pada eselon I dan IKK pada eselon II.
- 4. Pelaporan kinerja:
 - a) Pada LKj eselon I terdapat kesalahan dalam penyajian informasi dalam LKj.
 - b) LKj pada eselon II umumnya belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - c) Pada Dit KK evaluasi dan analisis capaian kinerja belum optimal.
- 5. Evaluasi kinerja:
 - a) Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 109,34%, menurun dibanding tahun 2017 sebesar 121,26%.
 - b) Target IKP tidak seluruhnya tercapai.
 - c) IKP 1 dari target 2015-2019 sebanyak 260 unit, tercapai 155 unit sampai dengan 2018.
 - d) IKP 8 dari target 2015-2019 sebanyak 48 unit KEE, tercapai 38 unit KEE sampai dengan 2018.

Langkah-langkah untuk menghadapi kendala dalam evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu:

1. Perencanaan kinerja:
 - a) Melakukan evaluasi program terkait kesesuaian penetapan target baik pada dokumen renstra, renja, PK eselon I dan turunannya.
 - b) Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik.
 - c) Mendokumentasikan hasil monitoring capaian target renstra disertai hasil evaluasi terkait hambatan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan menyusun rencana aksi untuk perbaikan atas hambatan yang belum ditindaklanjuti.
 - d) Mengevaluasi anggaran dan kegiatan tahun 2019 untuk lebih focus terhadap pencapaian target renstra IKP 1 dan IKP 8.
2. Pengukuran kinerja:
 - a) Mengupdate SOP yang telah ada dan disesuaikan dengan kondisi terkini, serta menyediakan list bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan SOP tersebut.
 - b) Menyusun format identifikasi sasaran kerja pegawai dari staff sampai dengan eselon III sesuai dengan PK.
 - c) Menggunakan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan secara berkala.
3. Pelaporan kinerja:
 - a) Menyempurnakan LKj sesuai data yang disajikan pada LKj tahun 2015, LKj 2016, dan LKj 2017.
 - b) Melakukan evaluasi program dan evaluasi kesesuaian penetapan target IKP pada dokumen PK eselon I dengan dokumen PK eselon II tahun 2019.
 - c) Melengkapi LKj dengan penjelasan atas perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017.
4. Evaluasi internal:
 - a) Menyusun SOP terkait evaluasi program.
 - b) Melaksanakan evaluasi program berdasarkan data monitoring capaian kinerja bulanan yang telah disusun.
5. Pencapaian kinerja:
 - a) Melakukan evaluasi atas capaian target IKP 2018 yang belum tercapai pada Direktorat KK, KKH dan BPEE untuk diketahui hambatan dan penyelesaiannya serta agar lebih cermat dalam menetapkan target IKP.

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahun 2019 perwujudan capaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE.

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK dari kegiatan tersebut dan menjadi target capaian dalam perjanjian kinerja tahun 2019 adalah nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2018, bahwa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan akumulasi dari nilai evaluasi manajemen kinerja pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,44 poin

Capaian yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya hanya sebagai gambaran singkat atas pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 yang menyangkut koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Masih terdapat banyak hal yang harus dilakukan demi mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2019, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2020. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE serta semua pihak yang berperan serta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Jerry Subagiadi, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001

Daftar ISI

Ringkasan Capaian Kinerja	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Struktur Organisasi	1
D. Sumber Daya Manusia	2
E. Aset	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	4
B. Rencana Kinerja	5
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2019	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
1. Realisasi Capaian Kinerja	8
2. Capaian Rencana Kerja	11
3. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional	42
4. Capaian proyek SBSN	43
5. Capaian Aksi Tematik	45
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	51

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2019	7
Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019	8
Tabel 3. Nilai LKj tertinggi Tahun 2018	17
Tabel 4. Jumlah HAPAK dan PAK tahun 2019	25
Tabel 5. Usulan kenaikan pangkat tahun 2019.....	26
Tabel 6. Usulan kenaikan jabatan tahun 2019	26
Tabel 7. Data perkara perdata dan TUN 2019.....	33
Tabel 8. Proses Perizinan Bidang KSDAE Tahun 2019.....	34
Tabel 9. Surat Masuk Sekditjen KSDAE dan Dirjen KSDAE.....	39
Tabel 10. Realisasi Volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional.....	43
Tabel 11. Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan	49
Tabel 12. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.....	49

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE	2
Gambar 2. Sumber Daya Manusia Setditjen KSDAE 2019	3
Gambar 3. Rencana Strategis Setditjen KSDAE	5
Gambar 4. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2019.....	6
Gambar 5. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2019	6
Gambar 6. Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019.....	9
Gambar 7. Kelemahan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019.....	10
Gambar 8. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019	10
Gambar 9. Pencapaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2019.....	11
Gambar 10. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020	12
Gambar 11. Pembukaan Rakornis oleh Dirjen KSDAE	12
Gambar 12. Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2019.....	13
Gambar 13. Penyusunan RKA-KL Tahun 2020 Regional I	13
Gambar 14. Penyusunan RKA-KL Tahun 2020 Regional II	13
Gambar 15. Rapat Pengawasan Proyek SBSN 2019	14
Gambar 16. Seminar Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	14
Gambar 17. Kegiatan Petikawan Tahun 2019 di Buperta Cibubur.....	15
Gambar 18. Dokumen LKj Ditjen dan Setditjen KSDAE 2018	15
Gambar 19. Dokumen LCR Ditjen dan Setditjen KSDAE 2018.....	16
Gambar 20. Pemantauan capaian kinerja aplikasi SMART DJA.....	16
Gambar 21. Bimtek Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.....	17
Gambar 22. Laporan Tahunan SPIP Setditjen KSDAE 2019.....	18
Gambar 23. Festival Generasi Muda Cinta Lingkungan 2019.....	19
Gambar 24. Cover Buku Statistik Ditjen KSDAE 2018.....	19
Gambar 25. Talkshow Seribu Sampah Seribu Masalah.....	20
Gambar 26. Halaman depan SIDAK KSDAE	20
Gambar 27. Halaman depan website Ditjen KSDAE	21
Gambar 28. Perkembangan website ksdae.menlhk.go.id	21
Gambar 29. Pemberian Plakat Pemenang Video FTN/TWA 2019	22
Gambar 30. Desain Tampilan Sit Room Ditjen KSDAE.....	23
Gambar 31. Teknologi RFID untuk pendaki di TN Gunung Merbabu	24
Gambar 32. Halal Bi Halal dan pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE	25
Gambar 33. Buku pedoman standard dan uraian jabatan	28
Gambar 34. Buku Standar Operasional Prosedur	29
Gambar 35. Rapat penelaahan proposal kerjasama	30
Gambar 36. Koordinasi kerjasama lingkup Ditjen KSDAE	31
Gambar 37. Rapat perjanjian hibah lingkup Ditjen KSDAE	31
Gambar 38. Koordinasi data base kerjasama lingkup Ditjen KSDAE.....	32
Gambar 39. Rapat penyusunan laporan keuangan Ditjen KSDAE.....	35
Gambar 40. Dokumen Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2019.....	36
Gambar 41. Dokumen Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Triwulan II Tahun 2019.....	36
Gambar 42. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit.....	37
Gambar 43. Rangkaian kegiatan Pembinaan Pengelolaan PNPB	37
Gambar 44. Penyetoran dan sertifikasi bendahara pengeluaran.....	38

Gambar 45. Sosialisasi Bimtek Aplikasi SIK lingkup Ditjen KSDAE.....	39
Gambar 46. Arsip lingkup Setditjen KSDAE	39
Gambar 47. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	40
Gambar 48. Kegiatan Penyusunan RKBMN Tahun 2019	40
Gambar 49. Kegiatan Prioritas Nasional Ditjen KSDAE 2019	42
Gambar 50. Realisasi Volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional	43
Gambar 51. Capaian Kegiatan SBSN Ditjen KSDAE Tahun 2019	44
Gambar 52. Sarana dan prasarana wisata BTN Ujung Kulon.....	45
Gambar 53. Sarana dan prasarana wisata BTN Gunung Halimun Salak	45
Gambar 54. Sarana dan prasarana wisata BTN Alas Purwo	46
Gambar 55. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE per jenis belanja	48
Gambar 56. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE per sumber dana	48
Gambar 57. Perbandingan Realisasi Setditjen KSDAE 2015-2019	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (*Good Governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Setiap anggaran yang telah diberikan kepada setiap lembaga atau organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Setditjen KSDAE) sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi ini, maka sebagai pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019.

Komitmen kinerja yang harus dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015–2019 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE memiliki target untuk mencapai Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 pada tahun 2019 atau tahun terakhir dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2015-2019.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menjadi pendukung kebijakan yang sangat penting artinya bagi pembangunan kehutanan secara menyeluruh, khususnya di bidang KSDAE. Dengan penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya dapat dinilai dan dievaluasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 pada tahun 2019.

C. Struktur Organisasi

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas koordinasi dan memberikan dukungan administrasi serta fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama teknis dan bantuan advokasi hukum serta pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang didasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk

memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 4 Bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 Subbagian.

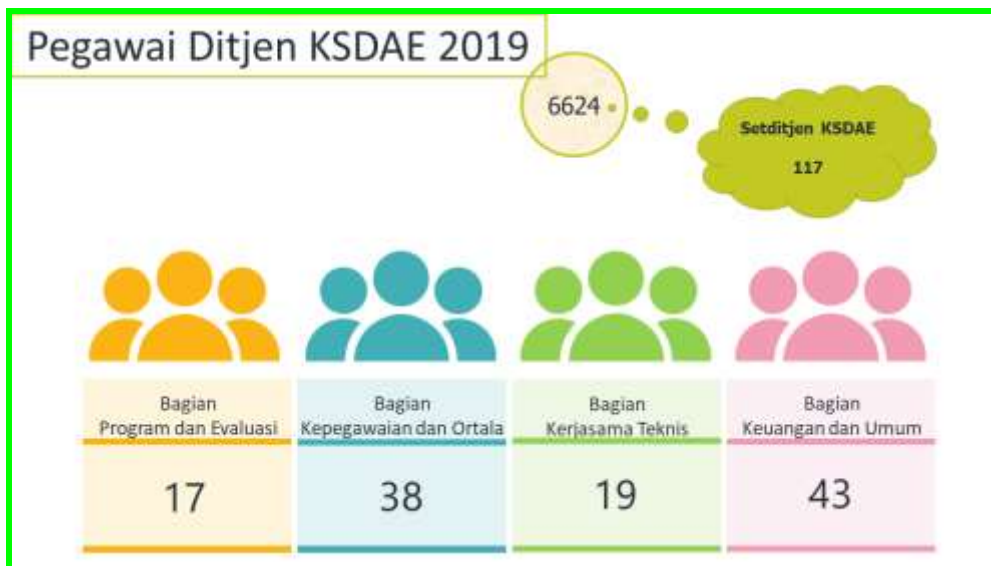


Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE

D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2019 didukung sebanyak 117 orang tenaga ASN. Sebaran pegawai terdapat di Bagian Program dan Evaluasi sebanyak 17 pegawai, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis sebanyak 19 pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebanyak 38 pegawai dan Bagian Keuangan dan Umum sebanyak 43 pegawai. Selain itu dibantu dengan pegawai pemerintah non pns (tenaga kontrak) sebanyak 50 orang.

Sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan administrasi kepegawaian sebanyak 6.624 pegawai Ditjen KSDAE.



Gambar 2. Sumber Daya Manusia Setditjen KSDAE 2019

E. Aset

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan penambahan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) intrakomptabel yang dikelola Setditjen KSDAE per 31 Desember 2019 mencapai Rp. 51.610.702.296,-.

Secara lebih rinci BMN intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2019 terdiri atas:

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 120.607.564,-.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, dan aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 51.351.398.357.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 138.696.375.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II. Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mengukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019.

RENSTRA SETDITJEN KSDAE

Visi

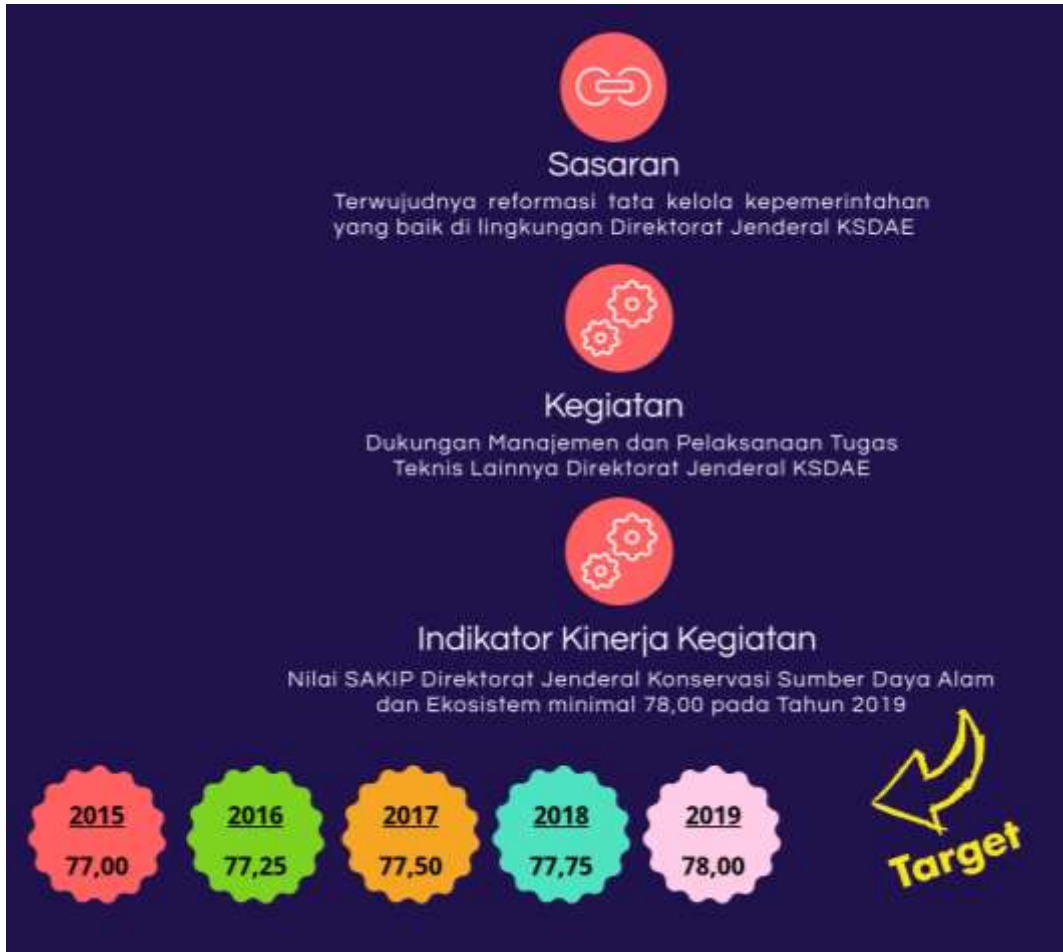
Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Misi

Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional

Tujuan



Gambar 3. Rencana Strategis Setditjen KSDAE

B. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor P.1/SET/PROEV/REN.2/12/2018 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019. Sedangkan penentuan kinerja tahunan telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE. Kinerja sasaran strategis yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE diukur melalui indikator kinerja kegiatan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78,00 poin pada tahun 2019.



Gambar 4. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2019

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2019 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Rp 73.731.082.000,- dengan rincian sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 5. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2019

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan adanya Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2019 hanya terdapat satu sasaran strategis dan satu indikator kegiatan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	78,00

Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dan Sekretaris Ditjen KSDAE selengkapnya disampaikan dalam Lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Realisasi Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan target sebesar 78,00 poin.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pengukuran capaian kinerja sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	78,00	78,44	100,56



Gambar 6. Hasil Penilaian SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2019 sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor S.113/ITJEN/ITWIL.1/WAS.3/04/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2018, bahwa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan akumulasi dari nilai evaluasi manajemen kinerja pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,44 poin. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2018 sebesar 78,44 poin telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 78,00 poin.

Kelemahan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE 2019

Perencanaan Kinerja:

- Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan RKT
- Target jangka menengah belum semuanya dimonitor
- Hambatan pencapaian target belum semuanya ditindaklanjuti
- Belum dilakukan reviu Renstra
- Terdapat perbedaan target IKP
- Anggaran dari target IKP yang telah tercapai harusnya difokuskan kepada Target IKP yang belum tercapai
- PK belum sepenuhnya dinfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat Es III dan Es IV.

Pelaporan Kinerja:

- Pada LKJ Es. I terdapat ketidakselarasan jumlah target realisasi dengan tahun sebelumnya
- Pada LKJ Es. II pada umumnya belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya



Pencapaian Kinerja:

- Rerata capaian kinerja tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017
- Target IKP tidak seluruhnya tercapai

Evaluasi Kinerja:

- Belum melakukan evaluasi program
- Belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program
- Rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan belum sepenuhnya ditindaklanjuti
- Belum semua permasalahan disertai rekomendasi tindak lanjut

Pengukuran Kinerja:

- Direktorat teknis belum ada SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date* secara tertulis
- Belum ada pengukuran yang berjenjang mulai dari staff, manajerial sampai pimpinan tertinggi
- Hasil pengukuran kinerja terkait *reward* dan *punishment* belum diterapkan
- Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap IKP pada Es. I dan DOK pada Es. II.

Gambar 7. Kelemahan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019



Gambar 8. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019

Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih besar dari target pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin, meningkat sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2018 (78,03 poin). Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2015 dan 2016, nilai SAKIP tahun

2019 mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang terus naik selama 5 tahun terakhir yaitu komponen pelaporan dan evaluasi internal kinerja sedangkan komponen Perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja terus mengalami penurunan.



Gambar 9. Pencapaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2019

2. Capaian Rencana Kerja

Pencapaian IKK Nilai SAKIP didukung oleh 3 output yaitu: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran.

a) Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I didukung oleh komponen kegiatan yaitu:

➤ **Penyusunan Program dan Anggaran**

Capaian kegiatan komponen Penyusunan Program dan Anggaran dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen yaitu:

1) Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2020

Kegiatan yang dilakukan adalah rapat untuk menyusun Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2020 yang memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020. Keluaran yang dihasilkan yaitu dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020.



Gambar 10. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020

- 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-KL tahun 2020 seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE.

- 3) Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2020

Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2019 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu pada hari Rabu-Jum'at, tanggal 23-25 Oktober 2019 bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.



Gambar 11. Pembukaan Rakornis oleh Dirjen KSDAE

- 4) Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2019

Kegiatan yang dilakukan adalah menelaah usulan revisi dari UPT dan akan di reviu oleh Tim APIP dan Tim dari DJA. Output yang dihasilkan adalah Catatan Hasil Reviu dari Tim APIP dan diteruskan ke DJA sehingga menghasilkan Revisi Anggaran.



Gambar 12. Penelaahan Revisi Anggaran Tahun 2019

5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 Bidang KSDAE Regional I

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan RKAKL Tahun 2020 yang akan di susun oleh UPT dan ditelaah oleh Tim dari APIP, Bappenas, Biro Perencanaan dan Setditjen KSDAE. Output yang dihasilkan adalah RKAKL Tahun Anggaran 2020.



Gambar 13. Penyusunan RKA-KL Tahun 2020 Regional I

6) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 Bidang KSDAE Regional II

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan RKAKL Tahun 2020 yang akan di susun oleh UPT dan ditelaah oleh Tim dari APIP, Bappenas, Biro Perencanaan dan Setditjen KSDAE. Output yang dihasilkan adalah RKAKL Tahun Anggaran 2020.



Gambar 14. Penyusunan RKA-KL Tahun 2020 Regional II

7) Pengawasan Proyek SBSN lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan, pengusulan dan pengawasan dana SBSN untuk UPT Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2021.



Gambar 15. Rapat Pengawasan Proyek SBSN 2019

8) Seminar Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Memberikan arahan dan masukan terkait kemitraan konservasi dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.



Gambar 16. Seminar Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

9) Pameran Pada Kegiatan Pertikawan Tahun 2019

Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lingkungan dan Kehutanan melalui Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti dan menindaklanjuti Program Kerja Pimpinan Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2019.



Gambar 17. Kegiatan Petikawan Tahun 2019 di Buperta Cibubur

➤ **Evaluasi dan Pelaporan**

Capaian kegiatan komponen Evaluasi dan Pelaporan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen KSDAE dan Setditjen KSDAE Tahun 2018

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu 2 Dokumen (Laporan Kinerja Ditjen KSDAE dan Setditjen KSDAE Tahun 2018)



Gambar 18. Dokumen LKj Ditjen dan Setditjen KSDAE 2018

- 2) Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2018

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu 2 Dokumen (Laporan Capaian Renja Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2018)



Gambar 19. Dokumen LCR Ditjen dan Setditjen KSDAE 2018

3) **Facilitasi Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE dan Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP**

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu bimbingan teknis evaluasi SAKIP di UPT. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kegiatan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, untuk meningkatkan nilai SAKIP Ditjen KSDAE dan menyampaikan informasi terkait SAKIP Ditjen KSDAE kepada seluruh UPT Ditjen KSDAE.

4) **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang KSDAE**

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tematik. Laporan Tematik terdiri dari laporan prioritas nasional dan non prioritas nasional yang dipantau Kantor Staf Presiden (KSP), laporan realisasi anggaran dan fisik daerah perbatasan.



Gambar 20. Pemantauan capaian kinerja aplikasi SMART DJA

5) Bimtek Penerapan Aplikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMART, E-Monev dll)

Kegiatan Bimbingan teknis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menginput data-data pelaporan dalam aplikasi SMART DJA dan aplikasi E-Monev Bappenas. Dihadiri seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE yang membawahi bagian evaluasi dan pelaporan.



Gambar 21. Bimtek Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

6) Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja

Kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan LKj dan Review atas Dokumen LKj Lingkup Ditjen KSDAE. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam kegiatan evaluasi dokumen LKj yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan. Beberapa kategori nilai untuk evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup Memadai), C (Kurang), dan D (Sangat Kurang).

Tabel 3. Nilai LKj tertinggi Tahun 2018

No	UPT	Nilai	Interprestasi
1	Direktorat PJLHK	98,70	AA
2	BTN Meru Betiri	98,25	AA
3	BTN Wakatobi	97,75	AA
4	Direktorat PIKA	97,50	AA
5	BTN Gunung Merbabu	97,50	AA

7) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen KSDAE

Sebagai salah satu satker yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan berupa kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE, maka Sekretariat Ditjen KSDAE wajib melakukan pengendalian intern atas kegiatan tersebut. Selain untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pengendalian intern ini digunakan untuk memastikan pencapaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen KSDAE. Sasaran tersebut ditunjukkan dengan target peningkatan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019 sebesar 78,00 poin.



Gambar 22. Laporan Tahunan SPIP Setditjen KSDAE 2019

8) Festival Generasi Muda Cinta Lingkungan 2019

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran generasi muda Indonesia dalam kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan dengan sasaran anak muda dari sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama yang terpilih di Jabodetabek.



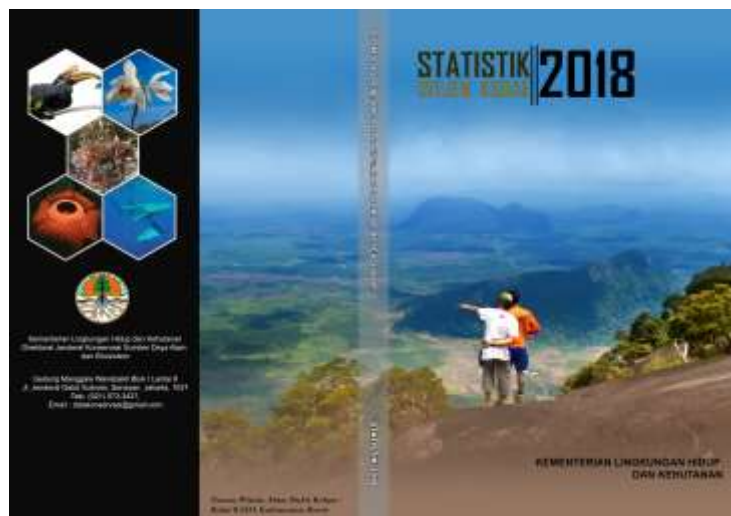
Gambar 23. Festival Generasi Muda Cinta Lingkungan 2019

➤ **Data dan Informasi**

Capaian kegiatan komponen Data dan Informasi dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

- 1) Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2018

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu 1 Dokumen (Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2018)



Gambar 24. Cover Buku Statistik Ditjen KSDAE 2018

2) Diseminasi Informasi KSDAE (Wanagama Rally XV)

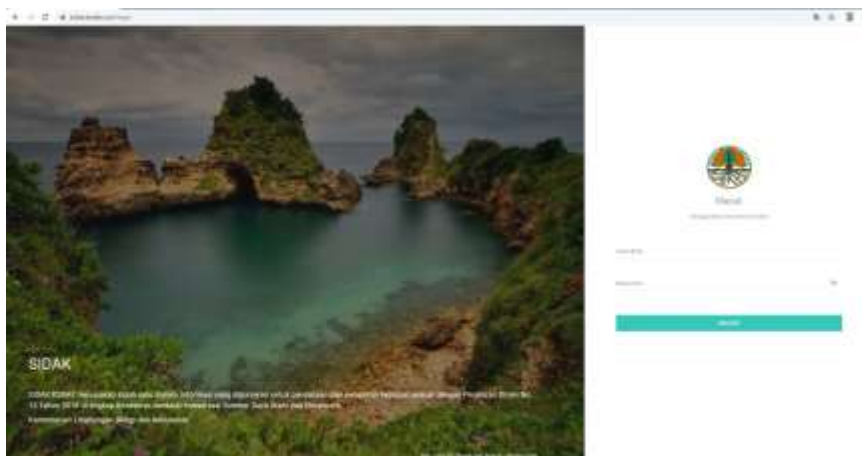
Kegiatan ini merupakan perwujudan dari salah satu tujuan organisasi yaitu mengembangkan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan mengenalkan hutan Wanagama I pada masyarakat, khususnya pada siswa/siswi SMA. Dalam hal ini Ditjen KSDAE diwakili oleh Direktur Kawasan Konservasi pada tanggal 27 September 2020.



Gambar 25. Talkshow Seribu Sampah Seribu Masalah

3) Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE

Updating aplikasi SIDAK KSDAE dilakukan oleh programmer dan analis data selama tahun 2019. SIDAK dikembangkan berbasis Web (*online*) yang dapat diakses melalui perangkat computer pc, netbook/notebook maupun smartphone.



Gambar 26. Halaman depan SIDAK KSDAE

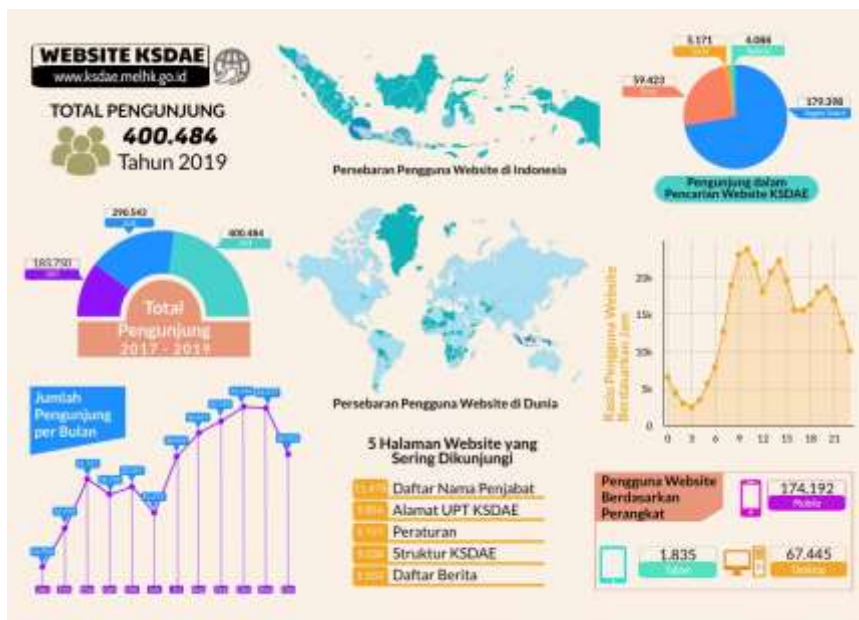
4) Pengelolaan dan Updating Website KSDAE

Website Ditjen KSDAE yang ada pada saat ini terbukti telah mempermudah bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar Ditjen KSDAE.

Berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE bisa diakses dengan mudah melalui website Ditjen KSDAE yang beralamatkan di ksdae.menlhk.go.id. Jumlah kunjungan public ke website Ditjen KSDAE mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 400.484 pengunjung dimana tahun 2018 hanya sebesar 290.543 pengunjung. Adapun 5 halaman website yang sering dikunjungi yaitu halaman Daftar Nama Pejabat, Alamat UPT, Peraturan, Struktur KSDAE dan Halaman Daftar Berita. Sampai saat ini jumlah berita yang sudah publish ke website Ditjen KSDAE yaitu sebanyak 2.134 berita.



Gambar 27. Halaman depan website Ditjen KSDAE



Gambar 28. Perkembangan website ksdae.menlhk.go.id

5) Penyajian Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Output dari kegiatan ini yaitu pemberian buku dengan judul Pariwisata Alam 54 Taman Nasional Indonesia dan *The Magnificent Seven: Indonesia's Marine National Parks* kepada masyarakat yang datang pada pameran Indogreen Environment and Forestry Expo 2019, Festival Taman Nasional/Taman Wisata Alam 2019, Hari Konservasi Alam Nasional 2019, Pameran Gelar Kebangsaan 2019, Launching Badan Pengelola Dana Kehutanan di Kemenkeu, Pameran Konservasi Alam pada Pertikawan 2019.



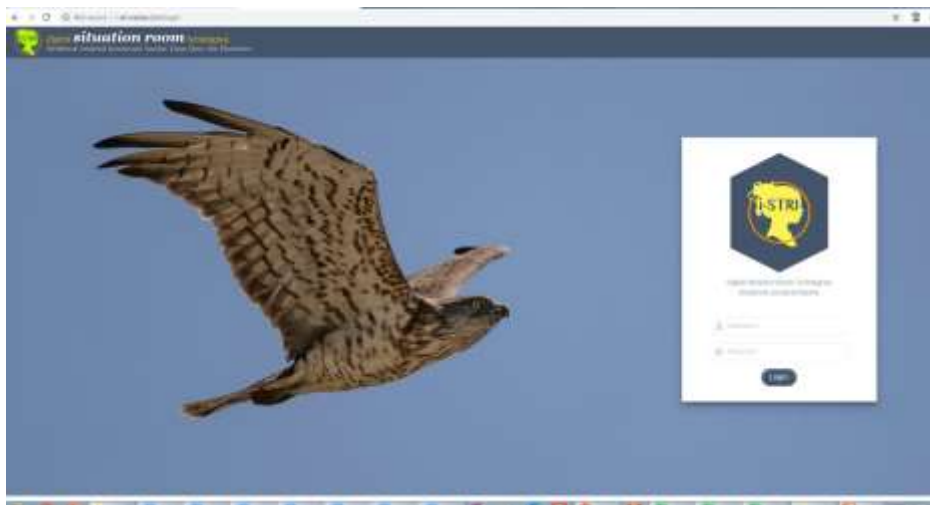
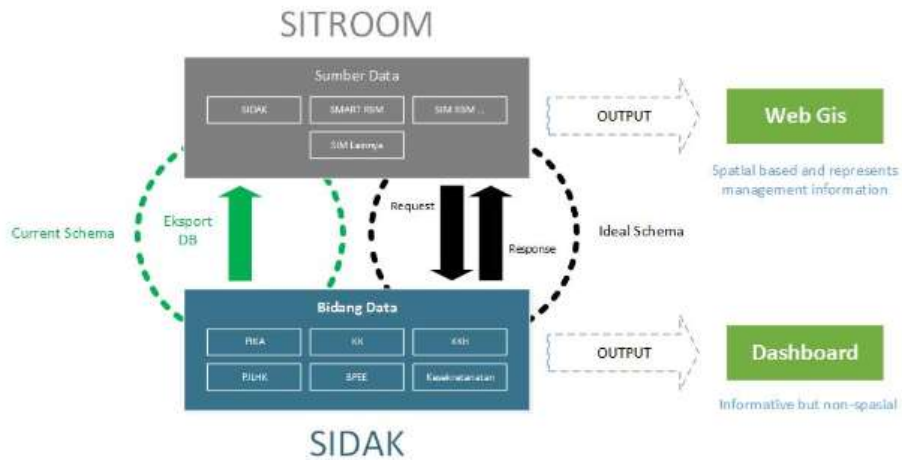
Gambar 29. Pemberian Plakat Pemenang Video FTN/TWA 2019

6) Kerjasama Gugus Tugas Multipihak (GTM)

Output dari kegiatan ini yaitu menyelesaikan beberapa permasalahan isu strategis bidang KSDAE. Isu yang dibahas antara lain munculnya isu akan ditutupnya Taman Nasional Komodo, pembahasan Konsep Note Usulan Proyek dalam rangka kegiatan Kerja Sama GTM, penyelesaian konflik di Taman Nasional Lore Lindu, Pembahasan Mikrosite Taman Nasional, pengembangan ekowisata di Tangkahan BBTN Gunung Leuser, permohonan ijin Pemanfaatan Lahan di Kawasan Konservasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Pengecekan lapangan (ground-check) ke KPHK Guntur Papandayan dan pelaksanaan pendampingan (couching) implementasi RBM di Resort Kamojang dan Resort Papandayan pada Balai Besar KSDA Jawa Barat.

7) Pembangunan Infrastruktur ICT (*Information and Communications Technology*)/*Operasional Sit Room dan RBM.*

Output dari kegiatan ini yaitu SITROOM diharapkan sebagai wadah atau tempat bagi level manajemen dalam membantu merumuskan sebuah keputusan/kebijakan dilingkup Ditjen KSDAE.



Gambar 30. Desain Tampilan Sit Room Ditjen KSDAE

8) Jelajah 54 Taman Nasional Indonesia

Output dari kegiatan ini yaitu menggali informasi dan potensi Taman Nasional yang perlu ditampilkan atau dikenalkan kepada masyarakat dengan penyajian informasi dalam bentuk video, infografis, dan dokumentasi lainnya. Dari Taman Nasional Gunung Merbabu adalah Inovasi cara pendaftaran online bagi pendaki, dengan menggunakan teknologi RFID, CCTV. Taman Nasional Gunung Ciremai yang diekspose adalah mengenai Prosedur pendakian di 4 jalur, detail dari mulai pendaftaran hingga bagaimana memmanage logistik saat pendakian. Taman Nasional Kepulauan Seribu yang diekspose adalah How to get there at Kep Seribu National Park.



Gambar 31. Teknologi RFID untuk pendaki di TN Gunung Merbabu

➤ **Administrasi Kepegawaian**

Capaian kegiatan komponen Administrasi Kepegawaian dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Penyusunan dan Tindak Lanjut Formasi Lingkup Ditjen KSDAE

Formasi CPNS tahun 2019 seluruhnya adalah 197,111 dengan proporsi Kementerian/Lembaga 37.854 untuk pemerintah daerah 159.257. Dalam hal ini KLHK mendapat alokasi 705 formasi dan untuk Ditjen KSDAE sejumlah 203 formasi dari usulan sejumlah 360 (56,3%).

2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Output dari kegiatan ini yaitu Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun dan untuk periode April tahun 2019 telah diproses sejumlah 506 usulan dari proyeksi 520 pegawai. Pada periode Oktober tahun 2019 telah diproses sejumlah 108 usulan dari proyeksi 198 pegawai. Tahun 2019 selanjutnya dilaksanakan serah terima jabatan sebanyak 3 (tiga) kali di Jakarta dan 1 (satu) kali di Batam. Masih terdapat 20 ASN yang harus didampingi dalam laporan LHKASN.

3) Penyelesaian Kasus/Penghargaan Pegawai

Pada tahun 2019 kasus-kasus kepegawaian sedangkan yang sudah diselesaikan/penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 36 kasus terkait ijin perkawinan/perceraian PNS, 26 kasus Laporan Hasil Audit, 18 kasus terkait dengan pelanggaran disiplin serta usulan Penghargaan pegawai pada periode tahun 2019 sebanyak 735.

4) Peningkatan SDM Lingkup Ditjen KSDAE

Pelaksanaan Pembinaan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE pada tanggal 8 Juli 2019 di Aula Komodo Kantor Direktorat Jenderal KSDAE di Bogor dihadiri oleh Para Pejabat Struktural Lingkup Ditjen KSDAE, Karyawan/Karyawati Lingkup Ditjen KSDAE, para pensiunan pegawai KSDAE, Perkumpulan Darma Wanita, serta Mitra-

mitra dan lembaga Swadaya Masyarakat yang ada kaitannya dengan Direktorat Jenderal KSDAE. Peserta yang hadir ± 400 peserta.



Gambar 32. Halal Bi Halal dan pembinaan pegawai lingkup Ditjen KSDAE

➤ **Administrasi Jabatan Fungsional**

Capaian kegiatan komponen Administrasi Jabatan Fungsional dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Penilaian DUPAK

Penilaian DUPAK adalah pemeriksaan dan penilaian butir-butir angka kredit usulan kegiatan PJF PEH dan Polhut. Tim Penilai Setditjen KSDAE terdiri dari Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ketua Tim), Kasubbag Administrasi jabatan Fungsional (Sekteraris Tim), Analis Kepegawaian, PEH Madya dan Polhut Madya.

Pejabat fungsional Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan yang sudah mendapatkan berupa HAPAK (Hasil Penilaian Angka Kredit) sesuai Berita Acara Penilaian DUPAK selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah HAPAK dan PAK tahun 2019

No	Bulan	HAPAK	PAK
1	Februari	19	22
2	Maret	92	121
3	April	54	97
4	Mei	39	137
5	Juni	61	79
6	Agustus	37	52
7	September	41	56
8	Oktober	83	53
9	November	42	82
10	Desember	37	88
Total		505	787

2) Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan Koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dilakukan melalui metode paparan materi, motivasi dan sosialisasi peraturan jabatan fungsional terhadap UPT yang mengalami kendala dalam pengelolaan administrasi jabatan fungsional dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan jabatan fungsional dan informasi yang sangat terbatas.

3) Pemberkasan Kenaikan Jabatan/Pangkat Fungsional

Output dari kegiatan ini yaitu Kenaikan pangkat pejabat fungsional mengikuti periode kenaikan pangkat PNS secara umum yaitu periode 1 April dan 1 Oktober. Sedangkan kenaikan jabatan dapat dilakukan kapan saja tidak dibatasi oleh periode.

Selama tahun 2019, jumlah usulan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan yang telah diproses adalah:

Tabel 5. Usulan kenaikan pangkat tahun 2019

No	Nama Jabatan	April	Oktober	Jumlah
1.	PEH	100	137	237
2.	POLHUT	258	292	550
3.	Penyuluh Kehutanan	16	23	39
4.	Fungsional Lainnya	16	6	22

Tabel 6. Usulan kenaikan jabatan tahun 2019

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	PEH	101
2.	POLHUT	233
3.	Penyuluh Kehutanan	8
4.	Fungsional Lainnya	5

4) Pengembangan Karier Pegawai (TB/IBM/UD/PIPG/4 Kriteria/Uji Kompetensi)

Pengembangan karier merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan pegawai diantaranya melalui tugas belajar, ijin belajar mandiri, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar, 4 kriteria dan uji kompetensi. Test 4 Kriteria diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. Selama tahun 2019, diusulkan sebanyak 306 orang, yang dipanggil mengikuti sebanyak 85 dan yang dinyatakan lulus sebanyak 84 orang. Total seluruh pegawai Ditjen KSDAE yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada tahun 2019 adalah

Program Doktor (S3) sebanyak 14 orang, Magister (S2) sebanyak 28 orang, yang perpanjangan tugas belajar sebanyak 18 orang, sedangkan untuk pencabutan karena tidak selesai melaksanakan studi untuk Doktoral (S3) sebanyak 1 orang dan Magister (S2) sebanyak 7 orang.

5) Pembahasan Penilaian KSDAE Award

Apresiasi kepada Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), diselenggarakan lomba PEH Berprestasi melalui ajang KSDAE Award. kegiatan ini adalah untuk memberikan penilaian kepada PEH secara terbuka, obyektif dan akuntabel. Penganugerahan PEH Berprestasi tahun 2019 diselenggarakan pada Hari Konservasi Alam Nasional di Batam Kepulauan Riau. Pemenang PEH Berprestasi tahun 2019 yaitu:

- a) Kategori PEH Keterampilan: Rio Duta Tri Wijaya (BBKSDA NTT)
- b) Kategori PEH Keahlian: Endro Setiawan, S.PKP (BTN Gunung Palung)

6) Peningkatan SDM Lingkup Setditjen KSDAE

Kegiatan pembinaan pegawai lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE dilakukan di Hotel Kinasih, Sukabumi. Pembinaan Pegawai Lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE selain diisi dengan materi dan pemberian motivasi dari ustadz juga dilakukan permainan atau game serta arung jeram yang bertujuan untuk memperkuat team bulding sehingga berdampak positif terhadap berjalannya suatu organisasi.

7) Workshop Pejabat Fungsional (PEH, POLHUT & Penyuluh Kehutanan) Lingkup Ditjen KSDAE

Isu keluaran dalam workshop ini yaitu Revisi Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian No.SE.02/Peg-4/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah Pejabat Fungsional di Kementerian LHK: jenis karya ilmiah terbatas, fungsional PEH, Polhut, Penyuluh Kehutanan berbeda dari tipe jenis fungsional peneliti dan widyaiswara sehingga karya ilmiah juga harus ada perbedaan tipe, jenis publikasi belum sesuai. Penguatan Tim Penilai Pendahuluan DUPAK : Belum ada SOP Penilaian Pendahuluan untuk setiap JFT, Belum ada standar kompetensi bagi tim penilaian pendahuluan DUPAK tiap JFT serta DUPAK online.

8) Rapat koordinasi Tim Penilai DUPAK Lingkup Ditjen KSDAE

Pelaksanaan kegiatan ini adalah membina profesionalisme dan kompetensi tim penilai DUPAK lingkup Ditjen KSDAE. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan melalui Pengarahan terkait dengan permasalahan dalam penilaian dupak yang disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten.

➤ **Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan**

Capaian kegiatan komponen Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

- 1) Review struktur, Tatakerja, tugas dan fungsi Organisasi lingkup Ditjen KSDAE

Output dari kegiatan ini yaitu dokumen naskah akademis 3 taman nasional baru (Taman Nasional Zamrud, Taman Nasional Gunung Maras, dan Taman Nasional Gandang Dewata) sebanyak 3 dokumen dan draf awal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kriteria dan klasifikasi UPT lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 1 dokumen.

- 2) Penyusunan dan Review Informasi Jabatan (pelaksana, pengawas, Administrator dan JPT) dalam rangka analisis Jabatan Lingkup Ditjen KSDAE

Penyusunan dan review informasi jabatan pada Satker Direktorat Teknis Lingkup Ditjen KSDAE diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan dan data, kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan (mengundang Eselon III lingkup Setditjen KSDAE dan Eselon IV lingkup Direktorat Teknis Ditjen KSDAE, sebanyak 4 kali pada bulan Maret, bulan Juli, dan bulan November) dan diakhiri dengan penyusunan buku pedoman standar dan uraian analisis jabatan.



Gambar 33. Buku pedoman standard dan uraian jabatan

- 3) Penyusunan/Review Petunjuk Teknis, Pedoman dan Prosedur Kerja (SOP, Bisnis Proses, Tata Hubungan Kerja) Lingkup Ditjen KSDAE

Tahun 2019 telah dilakukan bimbingan teknis dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Evaluasi Bisnis Proses di 5 (lima) Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE dan output yang dihasilnya sebanyak 11 dokumen SOP Eselon II dan 33 dokumen SOP unit pelaksana teknis (UPT).



Gambar 34. Buku Standar Operasional Prosedur

4) Implementasi dan verifikasi Penilaian Evaluasi Kinerja Organisasi pada Satuan Kerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen KSDAE

Kegiatan evaluasi kinerja organisasi dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen KSDAE, sosialisasi kebijakan Reformasi Birokrasi pada Ditjen KSDAE, dan menelaah hasil Self Assessment evaluasi kinerja organisasi UPT (Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM) Lingkup Ditjen KSDAE.

pelaksanaan survey secara online oleh Kementerian PAN dan RB dilaksanakan pada 12 September 2019, dengan responden dari Ditjen KSDAE sesuai surat tugas Sekditjen KSDAE No. 473/Set/KOTL/OTL/.0/9/2019 tanggal 6 September 2019 sejumlah 10 orang (diambil dari sekitar 24 orang peserta pembekalan survey) sebagai berikut:

Calon Peserta	Jumlah yang dibutuhkan	Peserta Survey Perwakilan Ditjen KSDAE
Eselon II	1 Orang	Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Eselon III	2 Orang	1. Hendra Wijaya, S.Hut., M.Si 2. Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si
Eselon IV	3 Orang	1. Inge Yangesa, S.Hut., LLM. 2. Desi Indriani, S.P., M.P. 3. Agus Setyabudi, S.Hut., M.Sc
Staf / Fungsional	4 Orang	1. Yayat Supriatna, SIP 2. Nurul Ma'rufi, S.Hut., M.Si 3. Rini Fitriah Entebe, S.Hut 4. Ahmad Firman Alghifari, S.Hut., MIL

➤ **Kerjasama dan Kemitraan**

Capaian kegiatan komponen Kerjasama dan Kemitraan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

- 1) Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama
Tahun 2019 terdapat 7 penelaahan proposal dan Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen KSDAE.
 - a) Penelaahan terhadap Draft Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Ditjen KSDAE) dengan WCS (Wildlife Conservation Society),
 - b) Penelaahan Proposal perjanjian kerjasama Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
 - c) Penelaahan proposal dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pembahasan dan Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis antara Balai KSDA Sulawesi Utara dengan PT. PLN (Persero),
 - d) Penelaahan proposal dan Perjanjian Kerjasama melalui kegiatan pengecekan lapangan rencana perpanjangan kerjasama pemanfaatan migas di Suaka Margasatwa Bentayan di Provinsi Sumatera Selatan, dan
 - e) Penelaahan Permohonan Kerjasama antara UPTD Tahura Ngurah Rai dengan PT. Taman Benoa Eksotik di UPTD Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
 - f) Rapat pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan PT. Krakatau Tirta Industri di Kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat
 - g) Rapat Pembahasan Draft Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Jenderal KSDAE) dengan Zoological Society of London (ZSL)



Gambar 35. Rapat penelaahan proposal kerjasama

- 2) Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama
Tahun 2019 terdapat 4 kerjasama yang dievaluasi dengan Ditjen KSDAE.
 - a) Evaluasi kerja sama Orangutan Foundation International (OFI) di Kalimantan Tengah
 - b) Evaluasi pelaksanaan kerjasama penguatan fungsi TWA Seblat antara Balai KSDA Bengkulu dengan PT. Alno Agro Utama di Balai KSDA Bengkulu
 - c) Pemantauan kerjasama antara Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Paneco di Balai Besar KSDA Sumatera Utara

- d) Pemantauan kerja sama dalam rangka evaluasi kerja sama antara Balai TNBBS dengan Balai KSDA Bengkulu dan PT. Adhiniaga Kreasi Nusa di Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

3) Koordinasi kerjasama/kemitraan

Output yang dicapai dalam kegiatan koordinasi ini yaitu pengelolaan kerja sama database lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019



Gambar 36. Koordinasi kerjasama lingkup Ditjen KSDAE

4) Fasilitasi kerjasama Lingkup Ditjen KSDAE

Salah satu kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan yaitu berupa Rapat Finalisasi Konsep Perjanjian Kerjasama Hibah antara BKSDA Jakarta dengan Babacoote Village Inc. berdasarkan Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: UN.45/SET/HKST/KUM.3/2/2019 tanggal 14 Februari 2019. *Output* yang diharapkan yaitu terbentuknya suatu perjanjian antara Babacoote Village Inc. dengan BKSDA Jakarta.



Gambar 37. Rapat perjanjian hibah lingkup Ditjen KSDAE

5) Pemeliharaan Data Base Kerjasama

Database kerjasama tahun 2019 pada 74 UPT terdapat 724 kerja sama dengan rincian sebagai berikut 542 kerjasama yang masih aktif, 60 kerja sama yang sedang berproses dan 122 kerja sama yang telah berakhir.



Gambar 38. Koordinasi data base kerjasama lingkup Ditjen KSDAE

➤ **Peraturan Perundang-undangan**

Capaian kegiatan komponen Peraturan Perundang-undangan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri dan/atau Peraturan/Keputusan Dirjen KSDAE

Pada tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

Peraturan Menteri

- a) Pembahasan Finalisasi Penetapan Usulan Perubahan Daftar Jenis Rencana Usulan dan/atau Kegiatan Wajib Amdal.
- b) Pembahasan Revisi Perizinan Online Single Submission (OSS) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pembahasan Revisi Perizinan Online Single Submission (OSS) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- c) Pembahasan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2013 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- d) Konsultasi Publik Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE

- a) Pembahasan Draft Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Air dan Energi Air Non Komersial di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- b) Pembahasan Draft Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Konservasi SDAH dan E
- Pada tahun 2019 terdapat 4 Peraturan Menteri yang telah disosialisasikan kepada UPT dan Pemerintah daerah antara lain:
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi

➤ **Pertimbangan dan Advokasi Hukum**

Capaian kegiatan komponen Pertimbangan dan Advokasi Hukum dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Pada tahun 2019 telah ditangani 6 perkara Perdata dan 1 Perkara TUN, dengan rincian lokasi dan jenis perkara yang ditangani sebagai berikut :

Tabel 7. Data perkara perdata dan TUN 2019

No	Nomor Register Perkara dan Tanggal Gugatan	Objek Gugatan	Status	Keterangan
Perdata				
1.	No.35/PDT.G/2017/PN.LBJ Tanggal 13 September 2017	PMH dan klaim Kepemilikan tanah seluas ± 33.359 m2 di Kawasan Taman Nasional Komodo	Kasasi	-PN Labuan Bajo : Menang -PT Kupang : Kalah -MA : Proses
2.	44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl Tanggal 29 Agustus 2018	PMH dan Pemulihan Lingkungan Hidup di Taman Buru Semidang Bukit Kabu	Kasasi	-PN Bengkulu : Menang -PT Bengkulu : Menang -MA : Proses
3.	No.18/Pdt.G/2019/PN.Byw tanggal 29 Januari 2019	Proses pengadaan barang dan jasa (tender kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Wisata di Zona Pemanfaatan Pancur) di Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur	inkrah	-PN Banyuwangi : Menang -PT Surabaya : Menang
4.	No.5/Pdt.G/2019/PN.Sak tanggal 21 Februari 2019	Pencemaran dan kerusakan Lingkungan di kawasan Taman Nasional Zamrud, Siak, Riau	inkrah	-PN Siak Sri Indrapura : Menang
5.	No.21/Pdt.G/2019/PN Plw tanggal 9 Oktober 2019	Klaim kepemilikan lahan	inkrah	Gugatan dicabut

No	Nomor Register Perkara dan Tanggal Gugatan	Objek Gugatan	Status	Keterangan
6.	No.44/Pdt.G/2019 /PN.Dum tanggal 14 November 2019	Pembangunan pengolahan limbah di kawasan konservasi Hutan Wisata Sungai Dumai	Tingkat pertama	-PN Dumai : Proses
TUN				
7.	No.234/G/2019/PT UN.JKT Tanggal 26 September 2019	Keputusan Menteri LHK No.SK.23/MenLHK/Setjen/Peg.1/Rhs/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penjatuhan hukuman disiplin a.n. Donni Ricardo Barimbing, SH	Tingkat pertama	PTUN Jakarta : Proses

2) Asistensi Penyelesaian Kasus-Kasus Bidang KSDAE

Pada Tahun 2019 kegiatan Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus Bidang KSDAE adalah untuk membantu penyelesaian kasus dan perkara yang dihadapi UPT Direktorat Jenderal KSDAE, adapun lokasinya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Balai Taman Nasional Karimun Jawa

3) Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Pada Tahun 2019 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pertimbangan dan Bantuan Hukum dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan negosiasi dengan mempertemukan para pihak, fasilitasi keahlian/tenaga ahli dan fasilitasi perumusan langkah-langkah tindak lanjut dengan maksud dan tujuan membantu unit kerja ligkup Ditjen KSDAE Pusat dan daerah/UPT menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

4) Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE

Pada Tahun 2019 kegiatan Monitoring Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE sebanyak 103 perizinan sebagai mana dalam table berikut:

Tabel 8. Proses Perizinan Bidang KSDAE Tahun 2019

No	Jenis Izin	Progres Permohonan	
		Persetujuan Prinsip	Izin Definitif
1	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam		1
2	Lembaga Konservasi		5
3	Penangkaran		18
4	Peredaran TSL Komersil		52
5	Peredaran TSL Non Komersil		21
6	<i>Breeding Loan</i>	-	1
9	SIMAKSI:		
	a. Penelitian;		3
	b. Shooting;		2
	c. Ekspedisi.		-

5) In House Training Advokasi Hukum dan Penanganan Perdata/TUN

In House Training Advokasi Hukum dan Penanganan Perkara Perdata / Tata Usaha Negara dilaksanakan di Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 11 s/d 13 September 2019 dengan peserta sebanyak 80 orang yang berasal dari UPT lingkup Ditjen KSDAE.

➤ **Administrasi Keuangan**

Capaian kegiatan komponen Administrasi Keuangan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE Tahun 2018

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2018.



Gambar 39. Rapat penyusunan laporan keuangan Ditjen KSDAE 2018

2) Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2019

Laporan keuangan lingkup Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I tahun 2019 adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun lingkup Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I tahun 2019.

3) Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2019

Laporan keuangan lingkup Ditjen Triwulan III tahun 2019 adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun lingkup Ditjen Triwulan III tahun 2019.

- 4) Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2019
Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan



Gambar 40. Dokumen Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2019

- 5) Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2019
Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan



Gambar 41. Dokumen Laporan Keuangan Setditjen KSDAE Triwulan II Tahun 2019

6) Monitoring Tindak Lanjut LHA BPK RI, BPKP dan Itjen Lingkup Ditjen KSDAE

Data Awal laporan hasil audit kinerja pada satker Direktorat Jenderal KSDAE terdapat 1.231 temuan dan 3.320 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh saker pusat dan daerah. Dari hasil kegiatan pembahasan dan rekonsiliasi data dengan tim Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebanyak 795 temuan dan 2.436 saran/rekomendasi, sehingga masih sisa sebanyak 436 temuan dan 884 saran/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Satker Direktorat Jenderal KSDAE baik pusat maupun daerah.



Gambar 42. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit

7) Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara

Kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap satker yang memiliki kendala terhadap proses kerugian negara, meneruskan proses kerugian negara kepada Tim Penyelesaian kerugian Negara (TPKN) dan laporan bulanan atas setoran penyelesaian kerugian negara.

8) Pembinaan Pengelolaan PNBPN Bidang KSDAE

Pembinaan Pengelolaan PNBPN Bidang KSDAE mencakup beberapa kegiatan rutin tahunan diantaranya Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang KSDAE, Rekapitulasi Bulanan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Ditjen KSDAE, rapat-rapat koordinasi optimalisasi PNBPN



Gambar 43. Rangkaian kegiatan Pembinaan Pengelolaan PNBPN

9) Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hibah Ditjen KSDAE

Monitoring dan evaluasi penatausahaan hibah dilaksanakan dengan metode diskusi dan pengumpulan data. Materi pembahasan dalam rapat antara lain realisasi pendapatan dari hibah, pelaporan, mekanisme serah terima barang dan jasa hasil hibah serta masalah-masalah lain yang dihadapi selama mengelola hibah. Sedangkan dalam rangka monitoring juga dilaksanakan koordinasi dengan sekretarian jenderal KLHK dan Kementerian Keuangan.

10) Penyegaran dan Sertifikasi Bendahara Lingkup Ditjen KSDAE

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lingkup Ditjen KSDAE yang sudah menjabat sebagai Bendahara pada satuan kerjanya tapi belum memiliki Sertifikasi Bendahara sebanyak 30 (tiga puluh) orang.



Gambar 44. Penyegaran dan sertifikasi bendahara pengeluaran

➤ **Ketatausahaan dan Umum**

Capaian kegiatan komponen Ketatausahaan dan Umum dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Asistensi Tata Kearsipan Lingkup Ditjen KSDAE di UPT

Output dari kegiatan ini adalah adanya keseragaman dalam proses penciptaan sampai dengan pemusnahan arsip di lingkup Direktorat jenderal KSDAE terutama pada Unit Pelaksana Teknis serta diketahuinya permasalahan yang sering muncul dalam tata kearsipan seperti petugas khusus, sarana dan prasarana serta penemuan kembali arsip yang dikelola.

2) Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SIK lingkup Ditjen KSDAE

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE adalah Meningkatnya kapabilitas operator

tata persuratan dan tata kearsipan di setiap Satker lingkup Ditjen KSDAE, Tersosialisasinya aplikasi Sistem Informasi Kearsipan, Terkelolanya persuratan dan kearsipan Ditjen KSDAE yang lebih baik.



Gambar 45. Sosialisasi Bimtek Aplikasi SIK lingkup Ditjen KSDAE

3) Penatausahaan Persuratan dan Arsip

Jumlah surat masuk lingkup Ditjen KSDAE tahun 2019 yaitu:

Tabel 9. Surat Masuk Sekditjen KSDAE dan Dirjen KSDAE

No	Uraian	Jumlah
1	Direktorat Jenderal KSDAE	5.384
2	Sekretariat Ditjen KSDAE	4.169
	JUMLAH	9.553

4) Asistensi Tata Persuratan Kementerian LHK

Output dari kegiatan ini yaitu implementasi peraturan tata persuratan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen KSDAE

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan berupa daftar arsip in aktif yang akan disimpan di Unit Pusat Kearsipan I/II.



Gambar 46. Arsip lingkup Setditjen KSDAE

➤ **Administrasi Perlengkapan**

Capaian kegiatan komponen Administrasi Perlengkapan dalam tahun 2019 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain:

1) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2018

Kegiatan ini untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan Neraca Laporan Keuangan Tahun 2018.

2) Penyusunan Laporan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE Semester I Tahun 2019

Kegiatan ini untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan Neraca Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019.



Gambar 47. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Output dari kegiatan ini yaitu usulan RKBMN pengadaan yang disetujui hanya sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dan RKBMN pemeliharaan sebanyak 10.779 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) unit.



Gambar 48. Kegiatan Penyusunan RKBMN Tahun 2019

4) Penanganan Kasus-Kasus BMN dan Penyelesaian Permasalahan BMN

Output dari kegiatan ini penanganan kasus-kasus dan permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya adalah terdapat aset tanah dan bangunan yang diduduki oleh pihak lain, tanah yang kepemilikannya bersengketa dengan pihak lain, tanah belum memiliki sertipikat, bukti kepemilikan aset yang tidak lengkap, banyaknya aset yang hilang atau tidak ditemukan, pengelolaan aset yang berasal dari hibah/kerjasama kemitraan, pencatatan ganda dan lain sebagainya.

5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian pengelolaan BMN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah belum diusulkannya penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang, pemanfaatan BMN belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang, jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan melampaui waktu yang di atur dalam surat keputusan pemanfaatan atau perjanjian kontrak, dan lain sebagainya

6) Penyelenggaraan Penghapusan/Pemindahtanganan BMN

Pada Tahun 2019, satker Sekretariat Ditjen KSDAE telah menyelesaikan proses pemindahtanganan dan penghapusan sebanyak 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 4, dimana surat persetujuan penjualan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor telah terbit di tahun 2018. Namun karena padatnnya jadwal lelang di KPKNL, pelaksanaan lelang baru dilaksanakan pada tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sedan, Toyota Camry tahun 2010, B 1250 PQA, dengan Risalah Lelang Nomor 4/32/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Penghapusan Nomor SK.2015/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- b. Sedan, Toyota Corolla Altis tahun 2008, B 1018 PQA, dengan Risalah Lelang Nomor 111/32/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Keputusan Penghapusan Nomor SK.2025/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- c. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah), Isuzu Panther tahun 2005, B 2871 BQ, dengan Risalah Lelang Nomor 355/32/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Surat Keputusan Penghapusan Nomor SK.8477/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
- d. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah), Isuzu Panther tahun 2006, B 8330 WU, dengan Risalah Lelang Nomor 294/32/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Surat Keputusan Penghapusan Nomor SK.8477/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

7) Pembinaan Pengelolaan BMN

Output dari kegiatan ini yaitu agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat ditangani oleh sumber daya manusia yang handal dan mengerti tata peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan aset negara.

8) Penertiban dan Pengurusan Buku PAS Senjata dan Amunisi

Tahun 2019 telah diterbitkan pembaharuan untuk 81 buku PAS dan izin pengangkutan untuk 2.050 (dua ribu lima puluh) butir amunisi senjata laras panjang dan senjata laras pendek.

9) Pembinaan Satpam

Tahun 2019, Sekretariat Ditjen KSDAE merekrut 1 (satu) orang personil kepolisian, dengan tujuan agar dapat memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan sebagai sarana memotivasi untuk meningkatkan kepedulian, kepekaan dan rasa percaya diri anggota Satpam

10) Inventarisasi Barang Milik Negara

Pada tahun 2019, Barang Milik Negara kondisi baik sebanyak 547 dan Barang Milik Negara kondisi rusak berat sebanyak 568.

- b) Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari Pengadaan Peralatan (Pengadaan Perangkat pengolah komunikasi sebanyak 41 Unit dan kendaraan bermotor minibus 2 unit) dan Fasilitas Perkantoran.
- c) Output Layanan Perkantoran yaitu Pembayaran Gaji Bulanan dan Tunjangan Kinerja dari Bulan Januari Sampai Desember 2019, Operasional serta Pemeliharaan kantor Setditjen KSDAE.

3. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

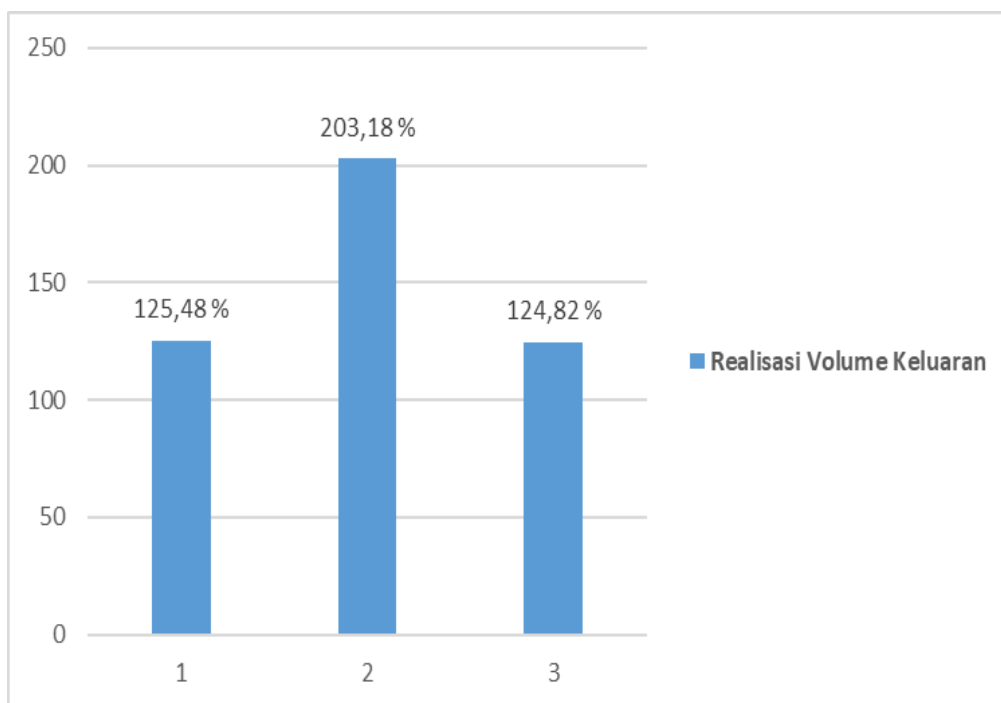
Sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE turut berperan dalam pelaksanaan 3 program prioritas nasional (PN) khususnya dalam penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran satuan kerja yang menjadi lokus prioritas pelaksanaan pencapaian program. Capaian 3 program prioritas yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE tahun 2019 sebagaimana dalam gambar berikut ini



Gambar 49. Kegiatan Prioritas Nasional Ditjen KSDAE 2019

Tabel 10. Realisasi Volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas nasional	Realisasi Volume Keluaran (%)
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	125,48 %
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	203,18 %
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	124,82 %



Gambar 50. Realisasi Volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional

4. Capaian proyek SBSN

Selain kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE, juga terdapat Proyek Surat Berharga Syariah (SBSN) yang dilaksanakan oleh beberapa satker Ditjen KSDAE tahun 2019, sebagaimana gambar berikut.

Pagu dan Realisasi proyek SBSN Ditjen KSDAE 2019



- Lokasi: BTN Aketajawe Lolobata
- Pembangunan Suaka Paruh Bengkok
- Pagu: Rp. 415.150.000,-
- Realisasi: Rp. 415.150.000,-



- Lokasi: BBTN Teluk Cendrawasih
- Pembangunan Resort Sowa, Kwatisore dan Whale Shark Center
- Pagu: Rp. 33.505.000.000,-
- Realisasi: Rp. 33.464.025.000,-



- Lokasi: BTN Alas Purwo
- Pembangunan Suaka Banteng Jawa dan Sarana Prasarana
- Pagu: Rp. 14.843.584.000,-
- Realisasi: Rp. 14.842.201.000,-



- Lokasi: BTN Ujung Kulon
- Pembangunan Pusat Konservasi Badak dan Sarana Prasarana
- Pagu: Rp. 18.979.235.000,-
- Realisasi: Rp. 18.978.793.557,-



- Lokasi: BTN Bunaken
- Pembangunan Mangrove Park Mantehage Island
- Pagu: Rp. 10.967.815.000,-
- Realisasi: Rp. 10.372.687.500,-



- Lokasi: BTN Gunung Halimun Salak
- Pembangunan Sarana Prasarana Tirta Terpadu dan Pendakian Gunung Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak
- Pagu: Rp. 10.967.815.000,-
- Realisasi: Rp. 10.372.687.500,-



Gambar 51. Capaian Kegiatan SBSN Ditjen KSDAE Tahun 2019

5. Capaian Aksi Tematik

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan kegiatan aksi tematik yaitu Janji Presiden, Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan aksi Bela Negara. Aksi tematik tersebut menjadi pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan prioritas tersebut untuk Janji Presiden dan Kebijakan Kelautan Indonesia serta pantauan Dewan Ketahanan Nasional (Dentanas). Dalam rangka pemantauan capaian rencana aksi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melakukan pemantauan capaian aksi tematik tersebut.

Tema: Janji Presiden

Ukuran Keberhasilan: Sarana dan Prasarana Wisata dalam pengelolaan Kawasan di 3 Taman Nasional yaitu BTN Gunung Halimun Salak, BTN Ujung Kulon dan BTN Alas Purwo.

Capaian: Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana wisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di BTN Gunung Halimun Salak, BTN Ujung Kulon dan BTN Alas Purwo.



Gambar 52. Sarana dan prasarana wisata BTN Ujung Kulon



Gambar 53. Sarana dan prasarana wisata BTN Gunung Halimun Salak



Gambar 54. Sarana dan prasarana wisata BTN Alas Purwo

Tema: Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)

1. KKI Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas.

Ukuran Keberhasilan: Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas, pada 2 Taman Nasional, yaitu BTN Bunaken dan BBTN Teluk Cendrawasih.

Capaian: Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana wisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di BTN Bunaken dan BBTN Teluk Cendrawasih

2. KKI Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%, pada 15 Kawasan Konservasi

Ukuran Keberhasilan: Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%, pada 15 Kawasan Konservasi.

Capaian: telah dilaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan metode METT pada 15 kawasan konservasi, yaitu 7 unit kawasan mencapai target nilai efektivitas minimal 70% (CA. Pulau Bokor, CA Watangan Puger I-VI, SM. Muara Angke, SM. Tanjung Amolengo, SM. Tanjung Batikolo, TWA. Sukawayana, dan TWA Sangalaki), dan 8 kawasan konservasi mempunyai nilai efektivitas kurang dari 70% (CA. Pasar Talo Reg.94, CA. Pulau Sempu, CA. Teluk Kelumpang Selat Laut-Selat Sebuku, SM. Kuala Lupak, SM. Pinjan/Tanjung Matop, TWA Sungai Liku, TWA. Pleihari Tanah Laut, dan TWA. Tanjung Keluang).

Tema : Bela Negara

Ukuran Keberhasilan : Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi sebesar 20 KW.

Capaian : 8 unit Mini/Mikro Hidro dengan kapasitas total sebesar 81 Kwatt.

1. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Pelaksanaan Pembangunan Demplot *Micro Hydro Electrical Power Plant* melalui kegiatan pemeliharaan microhydro power plant telah terlaksana di 6 (enam) lokasi sebagai berikut:

- a) Kelompok Masyarakat Pemanfaat Turbin (KMPT) Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 50 Kepala Keluarga.
- b) Kelompok Tani Sido Makmur Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, sebesar 50 KW untuk kebutuhan 120 Kepala Keluarga.
- c) Kelompok Tani Karya Mekar Pekon Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 30 Kepala Keluarga.
- d) Kelompok Tani Karya Makmur Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 100 Kepala Keluarga.
- e) Kelompok Karya Lestari Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 33 Kepala Keluarga.
- f) Kelompok Tani Sidomaju Pekon Way Nipah Kecamatan Pematangsawa Kabupaten Tanggamus, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 17 Kepala Keluarga.

2. Balai Taman Nasional Batang Gadis

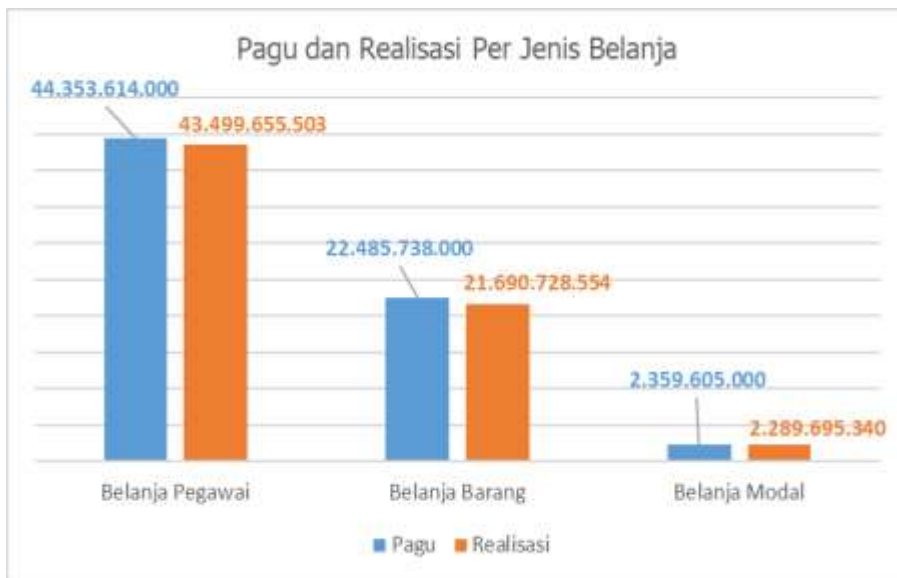
Pelaksanaan Pembangunan Demplot *Micro Hydro Electrical Power Plant* telah terlaksana di lokasi desa Muara Batang Angkola, sebesar 3 KW untuk kebutuhan 10 Kepala Keluarga.

3. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Pelaksanaan Pembangunan Demplot *Micro Hydro Electrical Power Plant* telah terlaksana di lokasi desa Mongilo Utara, sebesar 5 KW untuk kebutuhan 80 Kepala Keluarga.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019, berdasarkan sumber dana terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar 99,78% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 0,22%. Sedangkan berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar 64,10%, belanja barang sebesar 32,49% dan belanja modal sebesar 3,41%. Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tersebut, terbagi dalam 3 output kegiatan. Alokasi terbesar pada output Layanan Perkantoran sebesar 72,27% untuk pembayaran gaji dan tunjangan, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi pelaksanaan operasional kantor, diikuti berturut-turut output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 24,72% dan output Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 3,01%.



Gambar 55. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE per jenis belanja



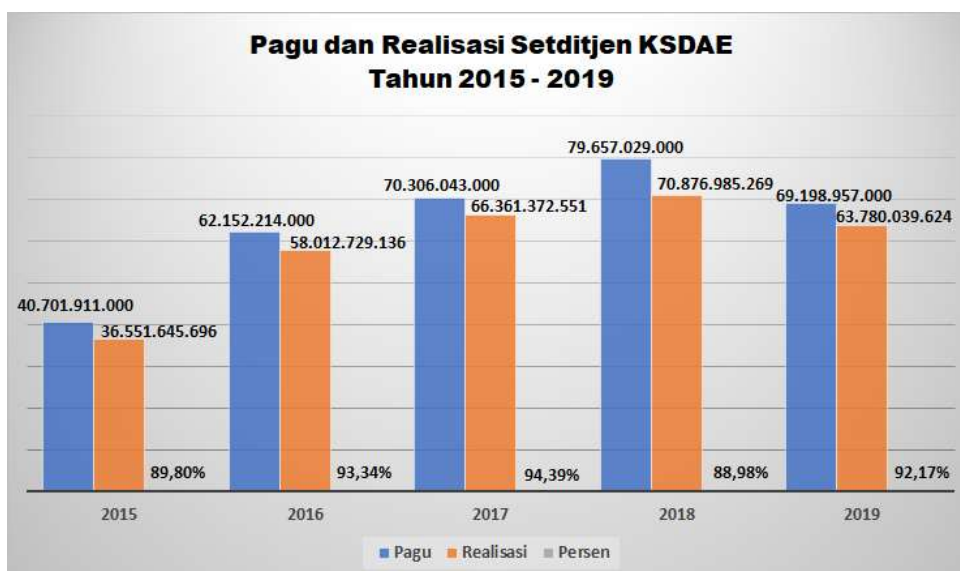
Gambar 56. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE per sumber dana

Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar **Rp.63.780.039.624,-** atau sebesar **92,17%**.

Berdasarkan 3 output kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran sebesar 93,27%, berturut-turut diikuti oleh output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 91,47% dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 71,52%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut

Tabel 11. Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan

Kode	Output	Pagu	Realisasi	%
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	17.105.652.000	15.646.674.572	91,47
5419.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.082.805.000	1.489.641.900	71,52
5419.994	Layanan Perkantoran	50.010.500.000	46.643.723.152	93,27
	Jumlah	69.198.957.000	63.780.039.624	92,17



Gambar 57. Perbandingan Realisasi Setditjen KSDAE 2015-2019

Capaian realisasi pada output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I ditentukan oleh capaian realisasi anggaran pada 9 komponen kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di masing-masing Bagian dan Subbagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian realisasi anggaran pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

No	Komponen	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	2.740.787.000	2.725.036.557	99,43
2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	889.950.000	865.156.573	97,21
3	Pengelolaan data dan informasi	1.790.900.000	1.770.384.013	98,85
4	Pengelolaan keuangan	1.414.470.000	1.374.642.507	97,18
5	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	3.438.350.000	3.357.099.680	97,64
6	Pengelolaan kepegawaian	2.373.370.000	2.360.224.216	99,45
7	Pelayanan umum dan perlengkapan	1.718.345.000	1.672.939.911	97,36
8	Pelayanan rumah tangga	2.022.355.000	1.929.291.755	95,40
9	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	717.125.000	697.532.766	97,27
	Jumlah Total	17.105.652.000	16.752.307.840	97,93

Beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran 2019 yaitu:

1. Realisasi anggaran setiap bulam masih ada yang belum sesuai dengan rencana penarikan dana
2. Masih terdapat keterlambatan dalam menyampaikan SPJ
3. Proses administrasi DIPA dari pencairan dana LS masih kurang tertib
4. Format pertanggungjawaban tidak seragam
5. Masih kurang Koordinasi antar bagian dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran

Solusi yang diterapkan dalam mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran 2019 yaitu:

1. Tingkatkan manajemen pengelolaan anggaran dengan mengevaluasi kembali Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan melalui:
 - a. Identifikasi kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran;
 - c. Analisis untuk mengetahui apakah RPD bulanan yang disusun dapat mendorong tercapainya target penarikan dana yang telah ditetapkan.
2. Upayakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target.
3. Tingkatkan budaya tertib, disiplin dan pelayanan yang optimal khususnya pada output yang berdampak pada masyarakat.
4. Membangun komunikasi yang intensif, pembinaan administrasi dan teknis dalam pengelolaan DIPA APBN Tahun 2019 agar tidak ada temuan.
5. Menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran melalui *website* Ditjen KSDAE secara berkala, sebagai bentuk transparansi publik

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan anggaran yang juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja kegiatan tercermin dalam capaian output berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sekretariat Ditjen KSDAE pada tahun 2019 memiliki satu output yaitu Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dengan target sebesar 78,00 poin yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dengan realisasi sebesar 78,44 poin sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,56%. Realisasi anggaran pada DIPA Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2019 sebesar Rp. 63.780.039.624,- atau sebesar 92,17% dari pagu anggaran sebesar Rp. **69.198.957.000,-**.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.
NIP. 19511115 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	78 Poin

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Anggaran :

Rp. 73.731.082.000,-

Jakarta, Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ir. Hani Soemardi, M.Sc.
NIP. 19611615 198703 1 001

Direktur Jenderal,

 Ir. Wjratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.

NIP. 19611115 198703 1 001

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	BK1 (4)	BK2 (5)	BK3 (6)	BK4 (7)
1.	Terselenggaranya reformasi data kebio-kepermerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Tahapan: 1. Penyusunan perencanaan kinerja - Penyusunan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Rencana Aksi	Tahapan: 1. Pengukuran kinerja 2. Pelaporan kinerja - Melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas 3. Evaluasi internal - Monitoring capaian kinerja setiap triwulan	Tahapan: 1. Pengukuran kinerja 2. Pelaporan kinerja - Melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas 3. Evaluasi internal - Monitoring capaian kinerja setiap triwulan	Tahapan: 1. Pengukuran kinerja 2. Pelaporan kinerja - Melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas 3. Evaluasi internal - Monitoring capaian kinerja setiap triwulan


 Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
 Heri Sutagast, M.Sc
 NIP. 19671113 196703 1 001

